

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN
RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(Penelitian Pada Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH

NURKELANA

NPM : 10 851 0012

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)10/8/23

ABSTRAK

Latar belakang Peneliti mengadakan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Rencana Pembangunan Desa (Penelitian pada Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) adalah ingin mengetahui seberapa besar kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dan merumuskan rencana pembangunan yang pada akhirnya menentukan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masalah yang kadang timbul dalam pembangunan dimana yang pembiayaannya berasal dari partisipasi masyarakat kadangkala mengalami hambatan-hambatan, baik yang berasal dari masyarakat sendiri maupun oleh sebab faktor-faktor lainnya.

Tujuan penulis mengadakan penelitian di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, faktor dan kontribusi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Tanjung Morawa dan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam masyarakat di Desa Tanjung Morawa-B dalam memberikan masukan pada pihak desa yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah bersifat kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan observasi lapangan, dokumentasi, studi pustaka, wawancara dengan informan langsung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Penulis adalah bahwa di Desa Tanjung Morawa-B merupakan salah satu desa yang berada di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang, Desa Tanjung Morawa-B memiliki luas wilayah \pm 620 Ha terdiri dari dataran rendah, memiliki penduduk yang cukup padat yaitu berjumlah 12.682 jiwa pada akhir Desember 2013 (sumber kantor Desa Tanjung Morawa-B). Kesimpulan yang dapat diambil Penulis setelah melakukan Penelitian di Desa Tanjung Morawa-B adalah bahwa Partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang mengerahkan segala kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang tumbuh secara sukarela didasarkan atas kesadaran sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

ABSTRACT

Investigators conduct background research on " Public Participation In Rural Development Plan Formulate (Research in Tanjung Morawa District of Tanjung Morawa - B Deli Serdang) want to know how big is the awareness and active participation of the community and to formulate development plans that ultimately determine the success of the planning development and implementation . Problems sometimes arise in the construction where the financing is coming from the fields of public participation when experiencing obstacles , both from the community itself or because of other factors.

The purpose of the authors in conducting research in the village of Tanjung Morawa - B District of Deli Serdang Regency Tanjung Morawa is to determine the form of community participation , and contributing factors of society in rural development planning meetings held in the village of Tanjung Morawa and to find out the problems that arise in the community in the village of Tanjung Morawa - B in providing input on the village related to public participation in the planning consultative village . The research methods used by the author is qualitative , data collection activities performed by field observation , documentation , library research , interviews with informants directly.

Results and Discussion author is that in the village of Tanjung Morawa - B is one of the villages in the jurisdiction of Deli Serdang , Tanjung Morawa - B has an area of \pm 620 ha consists of lowland , has a fairly dense population that numbered 12,682 souls at the end of December 2013 (source office Tanjung Morawa - B) . The conclusion that can be drawn author after doing research in the village of Tanjung Morawa - B is that community participation is an activity that mobilizes all the capabilities of a growing group of people who voluntarily based on self-awareness in order to meet their needs , both in the short and long time length .



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Perumusan Masalah	5
1.5. Pemecahan Masalah	6
1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. LANDASAN TEORI	9
2.1. Uraian Teori	9
2.1.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	9
2.1.2. Jenis dan fase Partisipasi Masyarakat.....	11
2.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	12
2.1.4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	14
2.1.5. Pembangunan Desa	19

2.1.6. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	21
2.2. Kerangka Pemikiran	30
BAB III. METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2. Populasi dan Sampel	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	35
3.4. Definisi Operasional Variabel	38
3.5. Tehnik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Peneitian	40
4.1.1. Keadaan Umum	40
4.1.2. Keadaan Khusus	46
4.2. Pembahasan	47
4.2.1. Partisipasi masyarakat dengan jalan mengadakan gotong royong.....	48
4.2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam bentuk lembaga ekonomi	50
4.2.3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan demikian strategisnya, karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakatlah yang pada akhirnya menentukan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sama halnya dalam pelaksanaan pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari lapisan masyarakat itu sendiri. Hal ini mengingat pembangunan pada hakeketnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup di segala bidang, maka sewajarnya seluruh masyarakat harus ikut serta bertanggung jawab untuk menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan di berbagai wilayah termasuk wilayah pedesaan yang mana di wilayah tersebut merupakan tempat tinggal sebahagian besar penduduk Indonesia.

Sumber pembiayaan pembangunan pedesaan terutama dari hasil partisipasi dari masyarakat sendiri, di samping bantuan daya yang diberikan pemerintah untuk dana pembangunan pedesaan setiap tahunnya. Maksud pemberian bantuan dari pemerintah setiap tahunnya, merupakan suatu usaha untuk mendorong dan merangsang partisipasi sendiri yang datang dari masyarakat sendiri. Namun dalam kenyataannya pembangunan pedesaan yang pembiayaannya bersumber dari masyarakat sering mengalami hambatan:

1. Pembangunan hanya menguntungkan sebagian kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan sisi ekstrim dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksud untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi kurang memenuhi maksud tersebut.

3. Pembangunan dimaksud untuk menguntungkan rakyat banyak, dan rakyat memahaminya tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan itu.
4. Pembangunan dipahami dan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikuti sertakan. (Kartasmita, 2007:33).

Dari kenyataan yang dikemukakan di atas, merupakan kegagalan pembangunan yang dilaksanakan di daerah atau wilayah yang tidak mencapai sasaran yang dikehendaki. Hal ini disebabkan partisipasi masyarakat yang tidak diikutsertakan secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan pembangunan yang diadakan tidak dapat mencapai sasaran yang bertujuan akhirnya baik dan berguna pada masyarakat itu sendiri.

Salah satu usaha yang dapat ditempuh dalam meningkatkan peranan masyarakat adalah dengan mensosialisasikan pentingnya makna pembangunan sehingga mereka turut serta menyumbang tenaga, pikiran maupun sumbangan dalam berupa dana dan material yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu maka upaya lainnya dalam upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa.

Musyawarah adalah suatu gejala sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan umumnya dan khususnya Indonesia. Artinya bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak berdasar mayoritas, yang menganut suatu pendirian tertentu. Hal ini tentu berarti bahwa pihak mayoritas maupun pihak minoritas mengurangi pendirian masing-masing, sehingga bisa dekat-mendekati. Unsur ini rupanya sudah ada sejak berabad-abad lamanya dalam masyarakat pedesaan di Indonesia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diharapkan dapat menjadi wadah yang berperan penting di desa ternyata masih belum dapat diandalkan. Hal ini dapat dilihat dari masih sangat dominannya peran tokoh masyarakat desa didalam menyusun apa yang direncanakan akan dibangun di desa. Demikian pula halnya dengan perencanaan yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana di desa baik itu berupa jalan, tempat ibadah, jembatan maupun balai desa. Hasilnya adalah suatu perencanaan yang belum tentu menampung aspirasi dan niat masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes yang ada masih jauh dari harapan yaitu suatu perencanaan pembangunan desa yang timbul akibat kesadaran warga desa untuk ambil bagian di dalamnya.

Adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang bersangkutan dengan mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa, adanya usaha berencana dan diorganisir guna membantu anggota masyarakat, membangun desa berarti membangun partisipasi dan mengintensifkan partisipasi masyarakat. (Kartasmita, 2007:56).

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang peranan dari Kepala Desa kenyataanya sangat dominan sehingga pelaksanaan pembangunan Desa lebih disebabkan atas inisiatif dari kepala desa dan stafnya serta kurangnya peran Musrenbangdes.

Dalam realisasinya seorang Kepala desa harus dapat memahami keinginan dari masyarakatnya dan dapat membedakan kepentingan pribadi dan kelompok, yang mana lebih jelas dikemukakan oleh Suradinata (2006:41) yaitu:



Modal dasar dari seorang pemimpin adalah pribadi yang mempunyai kemampuan, ketrampilan, kecakapan dan daya kreatif serta mempunyai daya imajinasi yang lebih dari stafnya, mempunyai keunggulan kemampuan tertentu sehingga dapat mempengaruhi orang lain sehingga orang itu mampu mengikuti dan melakukan apa yang menjadi harapan pemimpin dalam rangka melaksanakan tujuan organisasi atau perusahaan.

Dengan pernyataan di atas, maka kepala desa dapat mempengaruhi masyarakatnya dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwujud partisipasi itu akan dapat tercapai. Peranan kepala desa juga dapat membangkitkan semangat gotong royong sebagai perwujudan dari partisipasi masyarakat sehingga hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dapat diatasi bersama-sama. Dalam pembangunan desa yang ditujukan pada sarana fisik membutuhkan seseorang pemimpin yang mengayomi dan dapat mengarahkan masyarakat pada perubahan yang lebih baik.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan termasuk Desa lainnya di tanah air merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dari uraian-uraian di atas, maka untuk mengetahui bagaimana peranan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan dengan berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaannya, maka penulis merasa tertarik untuk menulis judul laporan akhir: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Rencana Pembangunan Desa (Penelitian Pada Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
2. Adanya jarak antara aparat pemerintah dengan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
3. Perumusan kebijakan pembangunan masih menempatkan kepentingan sebagian golongan masyarakat desa.

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis mengadakan pembatasan masalah, meliputi tingkat partisipasi masyarakat desa Tanjung Morawa B dalam musyawarah rencana pembangunan desa dalam rangka otonomi daerah.

1.4. Perumusan Masalah

Pembangunan yang pembiayaannya berasal dari partisipasi masyarakat mengalami hambatan-hambatan, baik yang berasal dari masyarakat sendiri maupun oleh sebab faktor-faktor lainnya. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap musyawarah rencana pembangunan desa, maka permasalahan yang timbul dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa-B?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa-B?

3. Bagaimanakah wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tanjung Morawa-B?

1.5. Pemecahan Masalah

Partisipasi Masyarakat Desa Tanjung Morawa-B dalam merumuskan Rencana Pembangunan cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan wujud nyata masyarakat keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung Morawa-B setiap tahunnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam rencana pembangunan adalah karena adanya rasa memiliki. Pembangunan dapat berjalan dengan adanya peran serta Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam melaksakannya karena kadang kala pembangunan tidak dapat berjalan karena dilaksanakan oleh Pemerintah saja harus juga ada dukungan masyarakat dan peran swasta.

Wujud Partisipasi masyarakat dapat dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat menghadiri musyawarah rencana pembangunan dalam merumuskan rencana-rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa.

Dari beberapa usulan yang diusulkan dalam musyawarah rencana

pembangunan kadang kala ada yang tidak disetujui oleh Pemerintah disebabkan karena banyaknya usulan yang masuk sehingga pemerintah harus lebih selektif dan memprioritaskan yang lebih penting dan utama untuk dilaksanakan.

1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis dalam mengadakan penelitian di Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah :

1. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, faktor dan kontribusi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Tanjung Morawa B.
2. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam masyarakat di Desa Tanjung Morawa B dan memberikan masukan pada pihak desa yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan serta berguna dalam menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis.

b. Kegunaan Praktis

Untuk mengetahui dan menemukan permasalahan yang timbul di masyarakat pedesaan, khususnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang musyawarah rencana pembangunan desa agar upaya mengatasi permasalahan

yang berkaitan dengan penelitian dan pembangunan yang sedang berjalan dapat diatasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bentuk perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi subangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha ynag bersangkutan”.

Sastropoetra (2008:40) bahwa: “Partisipasi adalah keterlibatan secara seponatan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”.

Mac Iver dan JI Gilin dalam Soeleman (2005:63) berpendapat:

Adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontiniyu dan terwujud oleh satu ras interaksi bersama”.

Selanjutnya Soeleman (2005:63) mengartikan masyarakat lebih khusus : masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan kasih sayang yang erat.

Beberapa hal pokok yang terkandung dalam batasan dari partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi yang lebih banyak dari pada keterlibatan secara fisik, dan ini akan menimbulkan kesadaran sehingga dapat menumbuhkan partisipasi.
- b. Partisipasi mendorong orang untuk memberikan sumbangan atau dukungan

kepada kehidupan kelompok yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

- c. Partisipasi mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam suatu kegiatan demi kepentingan bersama, karena apa yang disumbangkan dilakukan dengan sukarela sehingga akan menimbulkan rasa keterlibatan diri kepada organisasi.

Koentjaraningrat (2005:79) menyebutkan dua tipe partisipasi rakyat :

- a. Partisipasi adalah aktifitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus.
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Hal di atas diungkapkan Koentjaraningrat dengan mengharapkan partisipasi yang lebih baik dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat bekerjasama atas kepentingan bersama dan dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat.

Menurut pakar dibawah ini dalam Soekanto (2000:20) mengemukakan penertian masyarakat:

- a. Menurut Mac Iver dan Page, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistim dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang kerjasama antara berbagai kelompok dan golongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Keseluruhan yang berubah ini dinamakan masyarakat yang merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu bentah.
- b. Menurut Rapph Lipton, menyatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan kerjasama yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial yang batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- c. Menurut Selo Sumarjan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Berkumpulnya untuk waktu yang cukup lama sebagai akibat dari hidup bersama itu tumbuh sistim komunikasi dan aturan-aturan yang mengatur mereka.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, karena itu setiap anggota masyarakat merasa dirinya terikat satu sama lain.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diperoleh suatu pemahaman tentang partisipasi masyarakat, yaitu keikutsertaan seseorang atau kelompok manusia baik mental maupun emosional secara sadar untuk bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian tujuan yang dikehendaki oleh kelompoknya dengan mempengaruhi satu sama lain.

2.1.2. Jenis dan fase Partisipasi Masyarakat

Memperhatikan luasnya pengertian partisipasi, maka beberapa ahli berupaya mengkategorikan partisipasi dalam berbagai type atau bentuk sehingga makna dari partisipasi tersebut akan lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Menurut Hamidjojo dalam Priatna (2006:21) mengkategorikan partisipasi dalam berbagai jenis, yaitu :

- a. Partisipasi buah pikiran, bertukaran fikiran sumbangan pengalaman ilmu pengetahuan yang diberikan partisipasi dalam anjongsana pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga yang diberikan partisipasi dalam kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan dari orang lain dan sebagainya.

- c. Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran ilmu yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda paguyuban, misalnya turut arisan iayat (dalam peristiwa kematian), kondang (dalam peristiwa Pernikahan, nyambungan, mulung sambung).

Pendapat tersebut sesuai dengan Keith Davis dalam Sastropetro (2008:16)

yang menguraikan jenis-jenis partisipasi sebagai berikut :

- a. Pikiran (*Psychological participation*).
- b. Tenaga (*Physical participation*).
- c. Pikiran dan tenaga (*Psychological and Physical participation*).
- d. Keahlian (*participation with skill*).
- e. Barang (*Material participation*).
- f. Uang (*Money participation*).

Sedangkan menurut pendapat Chen dan Uphoff dalam Ndraha (2000:102)

terdapat empat tahapan / bentuk untuk mengukur partisipasi:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (perencanaan).
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
- d. Partisipasi di dalam evaluasi.

2.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa sekalipun partisipasi masyarakat merupakan unsur essensial yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan itu sendiri, tapi tidak setiap orang dapat berpartisipasi dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang dimaksud. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan,

perbedaan kepentingan dan perbedaan keahlian anggota Masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan hal diatas, maka menurut Sastropetro (2008:22)

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.
- c. Kecendrungan untuk menyalah artikan motifasi, tujuan dan kepentingan organisasi.
- d. Tersedianya kesempatan kerja diluar daerah.
- e. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berhasil dilaksanakan apabila tidak adanya motivasi dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan, dimana dengan adanya motivasi dari masyarakat maka terlaksananya tujuan yang diharapkan. Ini dikemukakan oleh Robert L. Isaac Ton dan Max L Hutt “ *Motives are theoretical concepts used to explain the diction, intercity and persistensee of behavior partions*”. (Motivasi adalah dasar psikologis yang memberikan arah, intensitas dan kesinambungan pada pola tingkah laku). (Robert, 2001:357).

Selanjutnya Moenir (2005:136) menyatakan: “Motivasi adalah rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai benda atau bukan benda tersebut”.

Maka peranan motivasi sangat penting pada partisipasi masyarakat didalam menumbuhkan pembangunan diwilayah pedesan. Sehingga masyarakat akan terdorong untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan.

2.1.4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diskusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Badan Perencanaan Pemerintah Daerah usulan masyarakat dikategorikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di Kelurahan/Desa dilaksanakan selama bulan Januari.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan

pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah –termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan- dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. Untuk Musrenbang desa, kemudian diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Payung hukum yang digunakan adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Prinsip-prinsip Musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar Musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

- Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.
- Prinsip musyawarah. Peserta Musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.
- Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

- Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling 'diam' untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.
- Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Kepala Desa.
2. Penjelasan tujuan dan agenda Musrenbang Desa, oleh Sekretaris Desa.
3. Pemaparan–Pemaparan (secara panel) dan diskusi pleno :
 - a. Pemaparan tentang Program/Proyek/Kegiatan yang akan masuk ke desa pada tahun 2013, oleh Kasi PMD Kecamatan.
 - b. Pemaparan tentang Program Prioritas pada tahun 2013, oleh wakil SKPD Kecamatan.
 - c. Pemaparan tentang realisasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2012 dan 2013, oleh Kepala Desa.
 - d. Tanya jawab dengan peserta Musrenbang Desa.
4. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
 - a. Pemaparan Draft RKP Desa, oleh Sekretaris Desa sebagai ketua Tim

- Penyusun RKP Desa.
- b. Pembahasan Draft RKP Desa oleh peserta Musrenbang Desa.
 - c. Penetapan RKP Desa tahun 2013.
5. Penentuan Kegiatan yang didanai melalui Swadaya Desa dan ADD 2013.
- a. Kepala Desa menjelaskan ancar-ancar besaran ADD dan pola penggunaannya.
 - b. Sekretaris Desa memandu peserta Musrenbang Desa untuk menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui swadaya desa dan ADD tahun 2013. Kegiatan yang disepakati tersebut bersumber dari RKP Desa tahun 2013.
 - c. Sekretaris Desa sebagai pemimpin rapat menetapkan kegiatan yang didanai melalui Swadaya Desa dan ADD 2013.
6. Penentuan Kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM P2SPP Tahun 2013. Berkaitan dengan hal ini, maka kegiatan yang pilih adalah kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2013. Proses penentuan kegiatan tersebut mengikuti tatacara yang telah ditentukan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan PTO PNPM P2SPP.
7. Penentuan kegiatan yang diajukan pada Musrenbang Kecamatan.
- a. Peserta Musrenbang Desa mengidentifikasi kegiatan yang akan diajukan sebagai usulan desa dalam Musrenbang Kecamatan. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa, tetapi belum mendapat kepastian pendanaan baik melalui swadaya desa dan ADD. Sedangkan kegiatan yang diusulkan untuk mendapat pendanaan dari PNPM MPd maupun PNPM P2SPP harus dimasukkan dalam DU RKP Desa.

- b. Peserta Musrenbang Desa berdiskusi untuk menyusun skala prioritas berbagai kegiatan tersebut berdasarkan bidang-bidang.
 - c. Peserta menyetujui urutan prioritas kegiatan sesuai dengan bidang-bidang.
8. Penetapan Delegasi Desa yang akan menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi Desa tersebut hendaknya merepresentasikan kepentingan kelompok pengusul, termasuk kelompok perempuan. Jumlah Delegasi Desa minimal 6 orang, terdiri dari Kepala Desa, Ketua LKMD dan tokoh masyarakat. Sebanyak 3 orang dari 6 orang delegasi desa merupakan wakil perempuan.

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah Musrenbang Desa adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyusun RKP Desa melakukan finalisasi dokumen RKP Desa berdasarkan masukan dan penyempurnaan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa. Selanjutnya Dokumen RKP Desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Keputusan Kepala Desa.
2. Tim Penyusun RKP Desa selanjutnya menyiapkan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) dan mendorong kepala desa untuk menyampaikannya kepada camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

2.1.5. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Istilah pembangunan ditinjau secara etimologi atau asal katanya dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran -an.

Sedangkan kata bangun menurut Ndraha (2000:1) :

Paling tidak mengandung empat arti. Pertama bangun dalam arti sadar dan siuman. Kedua dalam arti bangkit atau berdiri, ketiga dalam arti bentuk, keempat bangun dalam arti kerja, membuat, mendirikan atau membina. Jadi pembangunan meliputi segi anatomi (bentuk), fisiologi (kehidupan). Dan behaviand (prilaku)".

Sedangkan pengertian pembangunan menurut Siagian (2006:2) adalah: "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Bulding*)".

Dari beberapa fakta dibawah ini mengemukakan beberapa batasan.

- a. Pembangunan adalah merupakan proses dimana orang atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan tersebut.
- b. Pembangunan adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya.

Berdasarkan pendapat pakar-pakar diatas ada berapa hal yang perlu mendapat penekanan:

- a. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berkesinambungan atau melalui tahapan-tahapan.
- b. Dalam pembangunan akan melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat.
- c. Dalam mencapai tujuan pembangunan maka kegiatan awal dimulai dengan pengembangan dibidang ekonomi tanpa melupakan usaha dan kegiatan pembangunan dibidang lain.
- d. Dalam rangka pembangunan institusi-institusi masyarakat seperti gotong royong, permupakatan dan permusyawarahan perlu diperhatikan yang pada



akhirnya dapat dikembangkan bagi pembangunan dan untuk kehidupan nasional.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan berlangsung secara berencana dan akan mengarah kearah modernitas yang bersifat multi dimensional, yaitu mencakup seluruh aspek dari masyarakat disekitarnya terutama aspek pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian keberhasilan pembangunan dari pedesaan ditentukan oleh keselarasan dan keseimbangan dari pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan mulai perencanaan sampai pelaksanaannya.

Pembangunan fisik dapat diartikan: "Pembangunan fisik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai usaha pengaturan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisiknya.

Dari pernyataan di atas jelaslah bahwa aspek-aspek pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan ini merupakan perwujudan usaha dari tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertambahan manusia dan perkembangan kehidupan usaha serta kebudayaannya. Untuk mencapai pembangunan ini maka pemanfaatan sumber daya yang ada harus dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin.

2.1.6. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu perwujudan nyata dari rasatanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap warga yang membutuhkan hasil-hasil pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat senantiasa akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat maka makin berhasil pembangunan tersebut. Oleh karena itulah pembangunan yang dilakukan di pedesaan sangat ditentukan oleh unsur masyarakat dan pada hakekatnya pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan di pedesaan maka peranan partisipasi masyarakat sangat penting, dimana kemampuan dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sendiri di daerahnya. Partisipasi masyarakat adalah kemampuan dari kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Dari definisi di atas dapat disebutkan unsur-unsur dari partisipasi masyarakat yang berbentuk partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan dari kelompok masyarakat.
2. Atas kesadaran dan inisiatif sendiri dari masyarakat.
3. Adanya suatu usaha atau ikhtiar dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
4. Kebutuhan yang akan dilaksanakan/dibuat sangat dirasakan kepentingannya oleh kelompok masyarakat.

Dengan demikian jelas, bahwa partisipasi masyarakat itu lahir dari kesadaran dan inisiatif sendiri dari masyarakat. Selain itu wujud dari partisipasi masyarakat itu dapat berbentuk material ataupun uang, tenaga maupun sumbangan

pikiran. Sehingga tidaklah berlebihan apabila Pola Dasar dan Gerakan Operasional Pembangunan Masyarakat adalah berdasarkan atas partisipasi masyarakat, selanjutnya dijelaskan bahwa swadaya/partisipasi masyarakat harus menjadi dasar dari kegiatan pelaksanaan pembangunan masyarakat di pedesaan.

Partisipasi masyarakat harus dapat lebih dikembangkan menjadi nyata dan dinamis melalui usaha-usaha dan pembangunan masyarakat pedesaan.

Dengan demikian keberhasilan pembangunan pedesaan sangat tergantung dari kemampuan dari masyarakat sendiri untuk membangun daerahnya. Potensi yang ada di wilayahnya, baik potensi alam maupun sumber daya manusia harus dapat dikembangkan seoptimal mungkin sehingga tujuan dari pembangunan dari pedesaan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan tidak lupa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu dalam kegiatan fisik pedesaan perlu melibatkan seluruh masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil serta pengevaluasian hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat tersebut akan dibahas pada sub-sub sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan (Perencanaan)

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan desa terutama yang menyangkut perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan proyek pembangunan yang berupa pembuatan keputusan pembangunan pedesaan, baik proyek pembangunan dengan dana bantuan dari pedesaan maupun proyek yang dibangun dengan partisipasi murni dari masyarakat. Perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan

datang, apa yang dilakukan, bilamana akan melakukan dan siapa yang melakukan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan desa dapat dibedakan antara proyek pembangunan di desa yang sifatnya partisipasi murni masyarakat di sekitarnya dan proyek pembangunan desa yang mendapat bantuan pembiayaan dari dana bantuan desa.

Adapun data urutan bagian-bagian perencanaan yang merupakan sistematika berfikir dalam perencanaan yang meliputi :

a. Hasil akhir (*the ends*).

Spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran, target perencanaan. Di sini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bila mana kita akan mencapainya.

b. Alat-alat (*the means*)

Meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Di sini menentukan bagaimana rencana.

c. Sumber-sumber (*the resources*)

Meliputi kuantitas, pendapatan dan mengalokasikan beberapa sumber, antara lain: tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya.

d. Palaksanaan (*implementation*)

Menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan.

e. Pengawasan (*control*)

Menentukan prosedur yang akan dilaksanakan dalam menemukan kesalahan, kegagalan dari pada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

Dengan demikian bagian-bagian dari unsur tersebut harus terdapat dalam rencana, sebab banyak rencana tidak memuat hal tersebut.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk proyek pembangunan desa yang bersifat partisipasi murni dari masyarakat, maka sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat melalui musyawarah dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan desa ini terutama yang menyangkut dengan rencana pembangunan desa dapat dilihat dari dua aspek, yaitu frekwensi dan intensitas dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan desa/lingkungan. Tindakan ini dapat terwujud apabila mengikuti dan mendengarkan jalannya rapat dengan baik menyumbang ide-ide, gagasan/usulan serta ikut serta dalam pengambilan keputusan dan frekwensi dan intensitas masyarakat dalam menghadiri rapat-rapat yang membicarakan pembangunan di desa.

Jadi dengan demikian yang menjadi tolak ukur/indikator dari variabel-variabel di atas pada partisipasi dalam pembuatan keputusan pembangunan desa dapat diteliti pada penelitian ini, adalah :

- a. Frekwensi dan intensitas warga masyarakat desa dalam menyumbangkan ide, gagasan, usulan dan tanggapan terhadap masalah yang diperbincangkan dalam rapat desa.
- c. Frekwensi dan intensitas warga masyarakat desa dalam menghadiri setiap rapat yang membicarakan rencana pembangunan desa dan keikut sertaan masyarakat dalam merumuskan keputusan dan memberikan dukungan terhadap keputusan

yang telah ditetapkan.

2. Partisipasi Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah tindak lanjut dari keputusan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesediaan berkorban merupakan tanda rasa tanggung jawab yang tinggi, kecuali itu ada motif lain, yaitu rasa malu, rasa takut dan kesadaran moral atau etis.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan mengemukakan:

Perencanaan dapat dilakukan dan diperlukan untuk pembangunan dengan menentukan syarat sebagai berikut:

- a. Bersifat garis besar dan inisiatif
- b. Mengendalikan dan mengarahkan inventasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta.
- c. Mendorong kerja pasar.
- d. Mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya.
- e. Memajukan golongan masyarakat (dan wilayah) yang dengan ekonomi pasar tidak mungkin berkembang atau bersaing dalam memperoleh akses faktor produksi.

Prinsip partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan memperoleh manfaat pembangunan dan perjalanan dilaksanakan serta masyarakat turut serta dalam prosesnya. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan tidak berhenti pada satu tahap tapi akan dapat terlaksanakan dan terjadinya kemajuan yang terus menerus dalam kesejahteraan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik antara lain diwujudkan dengan kesadaran terhadap kewajiban, kesediaan untuk berkorban serta kesanggupan bertanggung jawab.

Dengan demikian partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat:

- a. Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan fisik desa.
- b. Keterlibatan secara tidak langsung tapi membantu sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, yaitu dapat berupa: sumbangan uang, material atau dalam bentuk informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Jadi dengan demikian yang menjadi tolok ukur/indikator dari pernyataan-pernyataan di atas adalah :

1. Tingkat kesediaan atau keterlibatan masyarakat dalam usaha memberikan sumbangan berupa bahan material untuk membangun.
2. Tingkat kesediaan atau keterlibatan masyarakat memberikan sumbangan berupa tenaga kerja fisik.
3. Tingkat kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan pikiran bila pada waktu proyek pembangunan sedang berjalan menghadapi permasalahan.
4. Tingkat kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa dana.

Perlu untuk diingat bahwa pelaksanaan pembangunan yang dijalankan dimasyarakat harus dapat berjalan sesuai dengan keadaan zaman yang sedang berlangsung, sehingga dalam realisasinya dalam pembangunan tidak ketinggalan zaman. Dengan kata lain adanya modernisasi yang dapat diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya akan berlangsung secara berbeda dan tidak sama, dalam penyalurannya dilapangan sehingga modernisasi tidak dapat diabaikan tetapi harus dapat diikuti oleh masyarakat. Suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.

Dengan pendapat yang dikemukakan di atas maka perubahan-perubahan (modernisasi) tidak dapat untuk diabaikan, sehingga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari harus dapat seiring dengan kehidupan dan kebutuhan dari masyarakat dimana masyarakat itu sendiri harus dapat menyesuaikan dengan kehidupan.

3. Partisipasi Dalam Pemanfaatan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Material Benefis (pemanfaatan secara materil, seperti peningkatan pendapatan, kekayaan).
- b. Sosial Benefis (manfaat secara sosial seperti fasilitas sekolah, kesehatan, perhubungan).
- c. Personal Benefis (manfaat secara pribadi seperti perasaan puas terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai).

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hasil dari pembangunan sejauh mungkin dapat memberikan manfaat dan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati pembangunan pedesaan dari :

- a. Keterlibatan masyarakat dalam menikmati manfaat material.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam menikmati manfaat sosial.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam menikmati manfaat pribadi.

Jadi dengan demikian indikator dari sub variabel ini adalah:

- a. Tingkat pemanfaatan pembangunan pedesaan bagi kehidupan pribadi.
- b. Tingkat pemanfaatan pembangunan desa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.
- c. Tingkat pemanfaatan pembangunan desa karena benar-benar dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat pedesaan.
- d. Tingkat pemanfaatan pembangunan desa karena dapat mengembangkan kehidupan warga masyarakat.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi adalah partisipasi masyarakat dalam upaya mengevaluasi serta menilai kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam menilai pembangunan adalah sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam penilaian evaluasi ini dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) bahwa :

“Partisipasi yang sebenarnya adalah bilamana seluruh masyarakat dari suatu lokasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tertentu mengadakan pengawasan sepenuhnya terhadap proses dan menentukan seluruhnya sendiri bagi terciptanya yang akan tercapai”.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengevaluasian pembangunan di desa antara lain diwujudkan dengan kesadaran untuk turut serta menguasai kegiatan pembangunan dan pengevaluasian hasil pembangunan dengan memberi saran (pikiran alternatif) dan kritikan.

Dengan demikian yang menjadi tolak ukur dari partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan adalah:

- a. Keaktifan warga masyarakat desa dalam mengawasi hasil dari kegiatan pembangunan.
- b. Keaktifan warga masyarakat luar desa dalam memberikan saran atau kritikan terhadap hasil-hasil pembangunan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam pergaulan hidup manusia, umum dikenal dua lingkungan hidup yang banyak perbedaannya. Kedua lingkungan hidup itu yang banyak perbedaannya. Kedua lingkungan hidup itu dikenal dengan nama desa dan kota. Masyarakat masing-masing lingkungan mempunyai pengaruh terhadap manusia yang hidup di dalamnya, hal itu nampak pada sifat dan kegiatan orang-orangnya, sehingga sering dibedakan atau dinamakan orang desa dan orang kota.

Masyarakat tidak lepas dari lingkungan, ia harus menyesuaikan diri dengan sifat lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi lingkungan dimana ia hidup. Diakui antara masyarakat desa ada perbedaan secara khusus namun kalau diteliti

secara mendalam terutama di desa-desa yang letaknya terpencil dari dunia ramai nampak beberapa ciri khas yang sama yaitu :

1. Kehidupan di pedesaan erat hubungannya dengan alam, mata pencaharian tergantung dari alam serta terikat pada alam.
2. Umumnya semua anggota keluarga mengambil bagian dalam kegiatan bertani, walaupun keterlibatannya berbeda.

Di pedesaan segala sesuatu seolah-olah membawa hidup yang rukun, perasaan sepenanggungan dan jiwa tolong menolong sangat kuat di hayati. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.72 Tahun 2005).

Sedangkan berdasarkan UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang dimaksud dengan Desa adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No.43 Tahun 2014 dikatakan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kemajuan yang ada keadaan pedesaan saat ini sudah mengalami banyak perubahan sekolah-sekolah didirikan, jalan-jalan diadakan dan diperbaiki, komunikasi semakin lancar dan sebagainya. Pedesaan mulai tergugah dari keterpencilan atau isolemenya, desa mulai menampakkan identitasnya yang asli.

Tantangan dalam usaha pembangunan masyarakat desa pada umumnya masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masih patuh pada tradisi dan adat istiadat turun-temurun. Bukan berarti tradisi dan adat istiadat yang dianut semuanya tidak menunjang usaha pembangunan, sebagian malah justru dibutuhkan dan berguna dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan masyarakat desa adalah kenyataan bahwa setiap desa tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan, tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Setiap desa mempunyai tradisi dan adat istiadat tersendiri, karenanya dalam usaha pembangunan masyarakat desa tidak ada suatu rumus atau cara yang dapat diterapkan secara umum.

Usaha-usaha pembangunan masyarakat desa harus memperhatikan keadaan lingkungan masing-masing desa. Hal ini perlu dilakukan dan dipahami oleh petugas-petugas pembangunan masyarakat desa.

Negara-negara berkembang dalam rangka mengejar keteringgalannya pada umumnya telah melaksanakan pembangunan nasional. Walaupun telah dilakukan

pembangunan nasional, pembangunan desa tetap perlu dan malah mutlak diberi perhatian, sebab kondisinya menuntut untuk segera ditanggulangi. Serta usaha pembangunan desa akan menunjang pembangunan nasional. Secara garis besar, penyebab perlunya diadakan musrenbang dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni:

1. Dampak nasional : Suatu negara terdiri dari desa-desa, kalau setiap desa sudah dibangun maka negara secara keseluruhan akan mengalami pembangunan . Dalam kaitan inilah maka sering dikatakan bahwa pembangunan desa identik dengan pembangunan nasional .
2. Segi jumlah penduduk : Penduduk suatu negara terutama pada negara berkembang sebagian besar yakni kurang lebih 80% berdiam dan menggantungkan hidup di pedesaan. Kalau penduduk desa sudah makmur, berarti mayoritas penduduk suatu negara akan mengalami kemakmuran.
3. Segi kondisi sosial dan ekonomi pedesaan : Pada umumnya masyarakat desa berada dalam belunggu rantai kemelaratan yang sifatnya saling menjalin atau sering disebut berada dalam Jebakan Penjarahan (deprivation). Akibat dari rantai kemelaratan itu adalah terperangkapnya masyarakat dalam kemiskinan terpadu. Di sisi lain, mengingat kelemahan yang melekat pada diri mereka, masyarakat tidak mampu untuk menerobos kemelut tersebut dan banyak dari mereka yang terjerumus dalam sikap apatis dalam kehidupan sehari-hari .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bernaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Waktu Penelitian dilakukan pada akhir bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut pendapat Nazir (2009:201) tentang populasi yaitu “kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat intervensi, dalam hal ini populasi berkenaan dengan apa yang disebut data bukan orang atau bendanya”.

Berdasarkan masalah penelitian dalam hal ini yang menjadi populasi adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga-lembaga Desa serta Tokoh-tokoh Masyarakat yang ada di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Arikunto (2006:89) tentang sampel yaitu “Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti”.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu keseluruhan perangkat desa/kepala dusun yang berjumlah 10 orang karena mengingat waktu penelitian yang terbatas.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian lapangan ini, guna memperoleh data atau informasi penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan dengan mengadakan :

- a. Observasi, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan. Bentuk observasi adalah non-partisipatif, yaitu penulis tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan objek penelitian,

melainkan hanya mengamati objek penelitian tersebut.

- b. Interview (wawancara), yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama Kepala Desa, Perangkat desa dan Lembaga-lembaga Desa serta Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

b.1. Kepala Desa

Kepala Desa sewaktu diwawancarai oleh Penulis mengatakan bahwa : “ Perencanaan dan perumusan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa harus dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat desa dan lembaga-lembaga desa dan hasilnya harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat desa “.

b.2. Perangkat Desa

Perangkat Desa sewaktu diwawancarai oleh Penulis mengatakan bahwa :” Perencanaan pembangunan di desa Tanjung Morawa-B sudah sesuai dengan keinginan masyarakat karena masyarakat sudah dilibatkan dalam pembangunan desa “.

b.3. Ketua BPD

Ketua BPD mengatakan bahwa : “ Perencanaan Pembangunan tidak hanya dalam bentuk seremonial saja tetapi harus ditunjukkan dalam karya nyata pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat Desa Tanjung Morawa-B yang masih banyak dibawah garis kemiskinan “.

b.4. Ketua LKMD

Ketua LKMD ketika diwawancarai berpendapat bahwa “ Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilakukan setiap bulan Januari adalah merupakan masukan bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan pembangunan terutama dalam bidang infra struktur agar dapat diajukan kepada Pemerintah Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Pebruari dan selanjutnya Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya “

b.5. Ketua TP.PKK Desa

Ketua TP.PKK Desa berpendapat bahwa : “ Musyawarah Rencana Pembangunan jangan hanya mengutamakan pembangunan infra struktur saja tetapi harus ada pengajuan tentang peningkatan keterampilan kepada kaum perempuan dan anak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat seperti keterampilan membuat kotak tissue, aksesoris jilbab,gantungan kunci dll. Yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan hasilnya tentu dapat berguna masyarakat itu sendiri “.

b.6. Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Morawa-B menyambut baik tentang kegiatan-kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat sehingga dapat tercapat tujuan dan cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan berharap agar Pemerintah dapat menyetujui dan merealisasikannya dengan segera.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang menjadi perhatian penelitian indikatornya harus jelas dalam arti dapat diamati dan diukur.

Kejelasan operasional variabel akan membantu memudahkan menyusun alat penelitian.

Pada penulisan skripsi ini nantinya penulis akan mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel dimaksud adalah :

1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga variabel yang diselidiki pengaruhnya yang dalam hal ini adalah “Partisipasi Masyarakat” terdiri dari :
 - a. Keterlibatan Individu Dalam Program Pembangunan
 - b. Dilakukan Secara Sadar
 - c. Saling mempengaruhi
2. Variabel terikat (Dependent Variabel) yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas. Dalam hal ini adalah “Musyawarah Rencana Pembangunan Desa” dengan indikatornya :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Hasil yang dicapai

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Variabel bebas “Partisipasi Masyarakat”, dengan indikatornya :
 - a. Keterlibatan Individu Dalam Program Pembangunan.

Merupakan suatu bentuk dari terjadinya interaksi antar individu dalam
UNIVERSITAS MEDAN AREA



suatu kumpulan masyarakat dari suatu kegiatan pembangunan

b. **Dilakukan Secara Sadar.**

Merupakan suatu perwujudan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan sepenuhnya secara sadar.

c. **Saling mempengaruhi.**

Keberadaan individu dalam suatu golongan keberadaannya mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya.

2. Variabel terikat “Musyawarah Rencana Pembangunan Desa“, dengan indikatornya sebagai berikut :

a. **Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu sistem yang merupakan penetapan target-target yang akan dicapai.

b. **Pelaksanaan.**

Pelaksanaan adalah perlakuan atas sesuatu yang direncanakan.

c. **Hasil yang dicapai**

Merupakan perwujudan hasil akhir dari perencanaan dan pelaksanaan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengadakan interpretasi data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi.

Dari hasil pekerjaan yang disebutkan di atas maka akan dilakukan penafsiran serta pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan skripsi ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan atas judul skripsi yang diajukan pada bagian-bagian bab terdahulu maka sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini yaitu bab kesimpulan dan saran.

5.1. Kesimpulan

Pada bab-bab terdahulu penulis telah mengemukakan dan menguraikan materi tentang permasalahan dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat adalah merupakan kegiatan yang mengerahkan segala kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang tumbuh secara sukarela didasarkan atas kesadaran sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Sekalipun partisipasi masyarakat itu tumbuh dari kesadaran dari dalam diri sendiri, namun untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi tersebut perlu adanya daya kekuatan yang dapat merangsang kekuatan masyarakat tersebut dapat muncul.
3. Pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Morawa-B cukup baik, namun untuk menyalurkan partisipasi masyarakat ke dalam suatu

- organisasi ekonomi masyarakat sangat sulit sekali dilaksanakan.
4. Bentuk organisasi ekonomi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dikelola oleh Badan-badan Usaha Swasta seperti bank-bank yang ada di wilayahnya.
 5. Partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang diwujudkan dalam bentuk sumbangan pikiran berupa saran, pendapat dan gagasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil atau dilaksanakan.
 6. Usaha-usaha yang diambil untuk meningkatkan musyawarah partisipasi masyarakat adalah :
 - a. Mengikut sertakan masyarakat dalam musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah Desa baik itu musyawarah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat maupun dalam bentuk kegiatan mengisi pembangunan itu sendiri.
 - b. Adanya pembinaan-pembinaan terhadap organisasi/kelembagan kemasyarakatan seperti BPD, LKMD, PKK dan organisasi kepemudaan lainnya.

5.2. Saran

1. Kiranya Pemerintah Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dapat membina masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan kelurahan dalam wadah organisasi kemasyarakatan.

2. Untuk merubah sikap dan mental masyarakat hendaknya Pemerintah lebih giat memberikan bimbingan agar masyarakat tidak bersikap apatis dan individualistis.
3. Sebagai organisasi ekonomi, hendaknya Badan Usaha Swasta yakni bank-bank swasta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai sarana pengkreditan dan dalam kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Aneka.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2007, *Administrasi Perkembangan Pemikiran dan praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Koentjaraningrat, 2005, *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Moenir, H.A.S, 2005, *Managemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu, 2000, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyatna, Soeganda, 2006, *Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan*, Jakarta: U.K Press.
- Roberth L Hunt Isacton, and Max L, 2001, *Psychologi the science and behavior*, New York: Herper and Row.
- Sastropetro, Santoso, 2008, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasidan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang P. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Sarjono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Soeleman, Munandar, 2005, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: PT.Eresco.
- Suradinata, Ermaya, 2006, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- UU NO.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- PP NO.72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP NO.43 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Pelaksanaan UU NO.6 2014 Tentang desa